

POTENSI

Pertumbuhan global meningkat dengan kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi negara maju serta meningkatnya perekonomian di negara berkembang dan emerging market

RISIKO

1. Risiko inflasi global naik seiring harga komoditas energi dan non-energi yang meningkat
2. US Policy Mix: Expansionary FP & Tight MP, Relaxation of Financial Regulation, and Trade Protectionism
3. Risiko geopolitik Eropa naik, ditandai peningkatan gelombang populism



**Potensi
dan
Risiko
Global**

2017: 3,4%

2018: 3,6%

POTENSI

Proyek infrastruktur dan reformasi struktural

Kenaikan harga komoditas

RISIKO

- Proteksionisme perdagangan global (US Policy mix)
- Reformasi struktural tidak sesuai harapan
- Risiko shortfall pajak (penerimaan pajak tidak sesuai target)



**Potensi
dan
Risiko
Nasional**

**2017:
5,0-5,4%**

Risiko Global:

Harga Komoditas
Trade Volume
Harga Minyak

APBN terganggu

-Pajak
-Ekspor Minyak
-Ekspor Komoditi

Transfer ke Daerah Tidak Optimal

Kondisi Struktural Perekonomian Daerah yang berbeda-beda

1. Disparitas Harga
2. Ketimpangan Sosial
3. Kemampuan PAD
4. Ketahanan Pangan
5. Konektivitas
6. Infrastruktur



**Pembiayaan
Pembangunan
DIY**

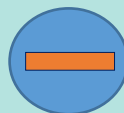
Konsep Anggaran Pemerintah

Pendapatan

- PAD
- Dana Perimbangan
- Lain2 Pendapatan yg Sah

Belanja

- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung



Pembiayaan Anggaran

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Penjualan Kekayaan Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

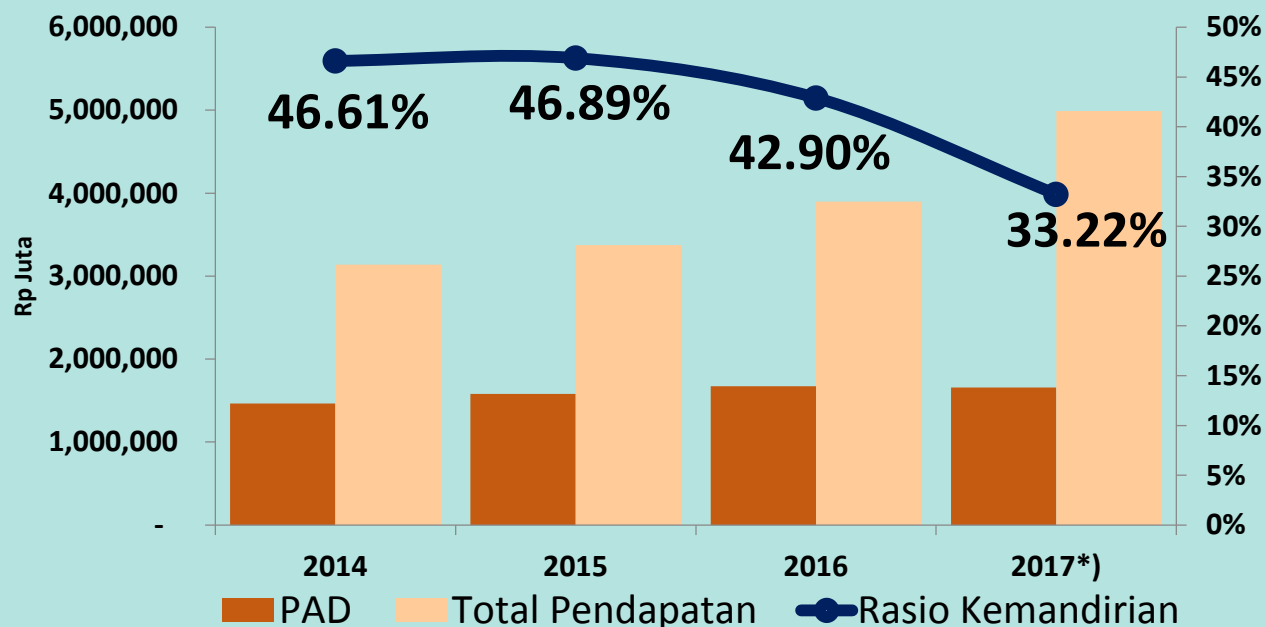
Penerimaan Piutang

Penerimaan Kembali Investasi

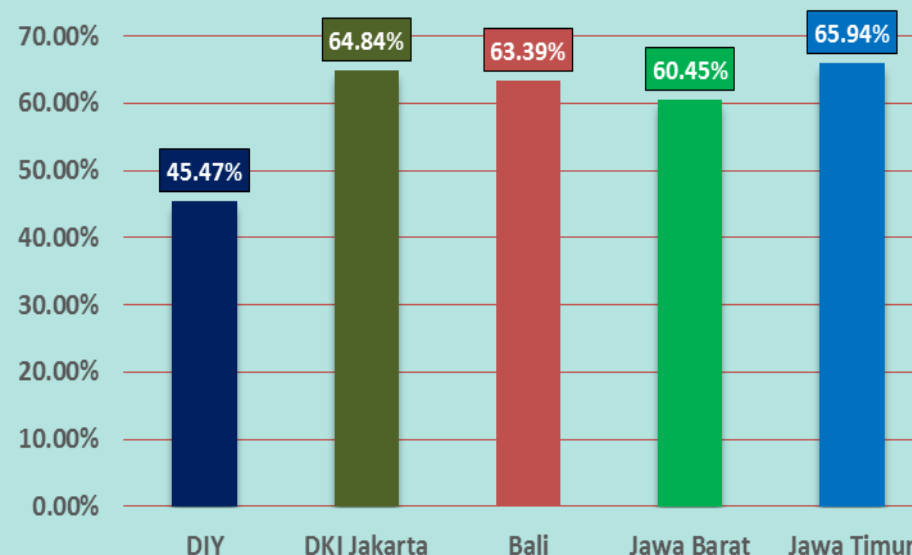
Penerimaan Biaya Penyusutan



Kemandirian Keuangan Pemerintah DIY



Rata-Rata Rasio Kemandirian Beberapa Provinsi



*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

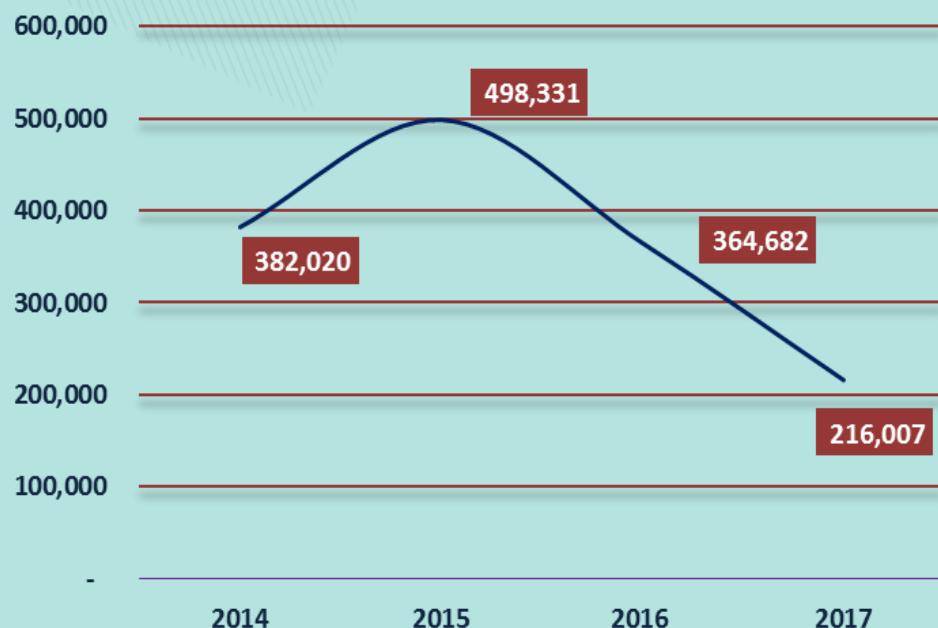
- Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah DIY menunjukkan tren yang menurun. Dan lebih rendah dari beberapa provinsi di Jawa.
- Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah semakin kecil.
- Untuk itu, perlu dicari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru atau intensifikasi & ekstensifikasi sumber2 yang sudah ada, sehingga finansial pemerintah DIY lebih mandiri untuk membiayai pengeluaran.



Sumber Pembiayaan Defisit APBD Pemerintah DIY



Selama ini, sumber pembiayaan DIY berasal dari SILPA yang jumlahnya terus menurun. Oleh karena itu, perlu menggali sumber-sumber pembiayaan lain yang belum dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan belanja Pemerintah DIY



(Juta Rp)

No	Pembiayaan	2014	2015	2016	2017 *)
1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	382,020	498,331	364,682	216,007
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	7,479	11,836	6,197	-
8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan		389,499	510,167	370,880	216,007

*) Rencana Pembiayaan APBD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)



Menopang Growth 5,0- 5,4%

**Dibutuhkan pertumbuhan
Belanja pemerintah harus**

6,2%

Pertumbuhan

2015 5,5%

2016 2,11%



**Peningkatan
Belanja**



1. Penggunaan SILPA yang optimum
2. Penggunaan Dana Cadangan
3. Pinjaman Perbankan
4. Penerbitan Obligasi Daerah untuk Proyek yang mendorong pertumbuhan 2018-2019
5. Pemberdayaan BUMD
6. Kerjasama dengan BUMN
7. Kerjasama dengan Pemda (khususnya Pemda berAPBD Surplus)
8. Mendorong Program Private Public Partnership (PPP)
9. Membentuk RIRU (Regional Investor Relation Unit)



**Pembiayaan
Pembangunan
DIY**

Sumber Pembiayaan: Penerbitan Obligasi Daerah

Dasar Hukum

PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

Prinsip

- Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;
- Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Revenue Bond*);

Keunggulan Obligasi Daerah

- Cost borrowing lebih murah
- Mendorong pemda meningkatkan *strata good governance*
- Mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
- Adanya kendali terhadap pola *expenditure* di Pemda melalui perjanjian pinjaman.



Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1 Rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) minimal 2,5 (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan)
- 2 Manajemen pengelolaan keuangan dan aset pemda harus dikelola secara optimal
- 3 Pemda perlu mendirikan lembaga yang nantinya fokus dalam pengelolaan obligasi
- 4 Pemda harus bersifat transparan, mempunyai manajemen risiko yang terukur, dan stabilisasi politik yang terjaga
- 5 Pemda perlu menyusun dokumen rencana pengembangan obligasi jangka panjang untuk meminimalkan potensi-potensi konflik

Sumber Pembiayaan: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- *Sumbangan BUMD saat ini masih terbatas, BUMD perlu terus ditingkatkan profesionalisme dan efisiensi untuk dapat meningkatkan pendapatan.*
- *Pendirian BUMD baru untuk menggali potensi sumber PAD, seperti rumah sakit internasional, obyek wisata dll*
- *Kerjasama antar BUMD untuk mengatasi permasalahan ekonomi, seperti inflasi dan konektivitas.*

DIY Memiliki 4 BUMD

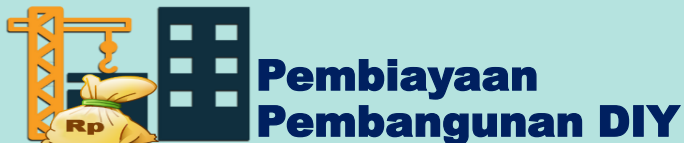
1. **BPD DIY** (Perbankan)
2. **PT Anindya Mitra Internasional** (Air minum, Transportasi, Percetakan, Perdagangan dan Pertambangan, Jasa Persewaan)
3. **Badan Usaha Kredit Pedesaan** (Pembiayaan UMKM Pedesaan)
4. **PT Tarumatarni** (Cerutu – Ekspor)



Fungsi BUMD

- 1 Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi & pembangunan daerah
- 2 Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
- 3 Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik,
- 4 Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik.
- 5 Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Dasar Hukum BUMD: UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah



Sumber Pembiayaan:

Public-Private Partnership

PPP merupakan alternatif bentuk pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah dengan menggandeng BUMN atau sektor swasta lainnya. Pola ini, dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sarana publik dalam pengembangan airport city Kulon Progo.

PPP merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam jangka panjang, dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, kedua belah pihak menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kerjasama.

Dasar Hukum: Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Lingkungan yang Kondusif untuk PPP:

- Kerangka kebijakan yang jelas
- Peraturan & Prosedur jelas, dan terinci
- Budaya kompetisi yang sehat
- Transparansi dalam setiap transaksi
- Pejabat pemerintah yang professional



Manfaat PPP:

- Memperoleh dana investasi tambahan.
- Meningkatkan pendapatan pemerintah.
- Mengadakan jasa umum yang belum tersedia.
- Mengoptimalkan penggunaan *asset idle*.
- Memperoleh teknologi baru yang unggul.
- Memperbaiki tingkat efisiensi proyek.
- Menciptakan kesempatan kerja.
- Meningkatkan kompetisi dan transparansi pengadaan.

Proyek-Proyek PPP (Contoh)



Jalan Toll



Revitalisasi Stasiun Tugu dengan PT KAI



Rumah Sakit Internasional



Bandara Kulon Progo – PT AP



Taman Hiburan



Pembangkit Tenaga Listrik

Sumber Pembiayaan:

Corporate Social Responsibility



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
- Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007
- Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001

Pola CSR



Program Penataan Sarana Pedagang Candi Prambanan



Program Tanam Mangrove di Muara Kali Opak Yogyakarta



Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada



Program CSR BPD DIY



MATUR NUWUN